

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2016**



**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS**

**Jl. Jend. Sudirman No.540 Kode Pos 53116
Telp/Fax. 0281-627965
PURWOKERTO**

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LKjIP tahun 2016 padahal haekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.

Visi penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan yang menjadi tugas tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas periode tahun 2014 .- 2018 adalah”“ *TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN BANYUMAS YANG BERDAYA SAING*“Dari visi tersebut, dijabarkan dalam 3 misi. Agar visi dan misi tersebut lebih mudah di implementasikan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas periode dalam mencapai tujuan dan sasaran diukur melalui capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan tahun 2016 direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kineja	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah transparan	Meningkatnya pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah transparan	- Jumlah izin yang terbit - Survei Kepuasan Masyarakat	115 %
2.	Peningkatan jumlah nilai investasi	Meningkatnya jumlah nilai investasi	- Jumlah investor berskala PMDN / PMA - Jumlah nilai investasi berskala PMDN / PMA - Ratio tenaga	118 %

			kerja	
3.	Meningkatkan iklim penanaman modal	Meningkatnya iklim penanaman modal	- Pemantauan kegiatan Penanaman modal - Jumlah aduan perizinan	114 %

Dengan capaian kinerja yang rata – rata mencapai lebih dari 115 %, maka capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Tahun 2016 masuk dalam kategori sangat baik, karena telah melampaui target yang ditentukan.

Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran / program Peningkatan Pengendalian dan pengembangan penanaman modal dan program peningkatan kualitas penanaman modal. Capaian ini disumbangkan oleh capaian indicator kinerja dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanaman modal, yang diampu oleh bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal, hal ini dikarenakan.

1. Masyarakat sudah banyak yang sadar betapa pentingnya dalam berusaha memiliki surat izin secara legal
2. BPMPP Terus berusaha member pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat dalam mengurus izin –izin usaha yang diperlukan
3. Telah diterbitkannya Perda tentang Penanaman Modal Daerah
4. Secara terus menerus melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian
5. Secara terus menerus melakukan pengkajian prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal agar lebih sederhana dan tidak berbelit – belit.

Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja sebesar
Rp. 2.102.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
		1. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 170.000.000,-	Rp.152.911.423,-	89
		2. Penyediaan bahan logistic kantor	Rp.148.200.000,-	Rp.131.931.032,-	89
		3. Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, 4. pengemudi dan kebersihan	Rp. 44.550.000,-	Rp. 44.550.000,-	100
		5. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	Rp.217.500.000,-	Rp. 205.411.833,-	94
		6. Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah	Rp. 150.000.00,-	Rp.147.915.000,-	98
2	Program peningkatan sarana dan prasarana				
		1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 110.000.000,-	Rp. 95.195.000,-	86
		2. Pemeliharaan rutin gedung kantor	Rp. 110.000.000,-	Rp. 90.925.184,-	83
		3. Pemeliharaan kendaraan dinas /	Rp. 143.670.000,-	Rp. 94.353.782,-	66

		operasional			
		4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 20.000.000,-	Rp. 16.953.300,-	85
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
		1. Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD	Rp. 30.000.000,-	Rp. 28.365.050,-	94 %
4.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi				
		1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Rp. 95.000.000,-	Rp.91.130.600,-	96 %
		2. Penyelenggaraan promosi investasi	Rp. 200.000.000,-	Rp.198.084.389,-	99 %
5	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi				
		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 40.191.600.-	80 %

		2. Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal	Rp. 60.000.000,-	Rp. 48.461.000,-	81%
6.	Program potensi penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana daerah				
		1. Penyusunan buku profil potensi / peluang investasi daerah	Rp. 50.000.000,-	Rp. 44.695.125,-	89 %
7	Program peningkatan kualitas pelayanan public				
		1. Mekanisme perizinan	Rp. 215.000.000,-	Rp. 194.238.542,-	90 %
		2. Sosialisasi penanaman modal	Rp .67.000.000,-	Rp. 56.878.000,-	85 %
		3. Kajian prosedur pelayanan perizinan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 42.008.810,-	84 %
		4. Peningkatan pelayanan perizinan	Rp. 165.000.000,-	Rp. 157.554.200,-	95 %

Biaya paling besar dikeluarkan untuk membiayai capaian kinerja sasaran kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi, biaya terendah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, sedangkan efisiensi tertinggi penggunaan keuangannya sebesar 80 % dan terendah sebesar 76 %.

Melalui LKjIP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2016 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis daerah.

PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good government and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan LKjIP tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP. Hasil pengukuran kinerja secara mandiri (self Assesment) capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah 95 %. Diharapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2016, semoga LAKIP ini akan bermanfaat bagi peningkatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif.

Purwokerto, 30 Desember 2016
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Kabupaten Banyumas

Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NP. 19630405n198503 1 021

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii-vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPMPP	1
C. Latar Belakang Penyusunan LKjIP	7
D. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP	8
E. Sistematika Penyusunan LKjIP BPMPP	9
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Perjanjian Kinerja	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja	38
C. Akuntabilitas Keuangan	42
IV. PENUTUP	47
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran keberadaan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di kabupaten Banyumas.

Badan Penanaman Modal Pelayanan perijinan (BPMPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 27 tahun 2009 serta Perbup Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas merupakan landasan hukum bagi terbentuknya Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan, memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam rangka pelayanan administratif dalam proses pemberian perijinan kepada masyarakat oleh perangkat daerah yang terkait.

Badan Penanaman Modal Pelayanan perijinan (BPMPP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana visi dan misi yang telah dijabarkan dalam program kerja tahunan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta

menyelenggarakan penerbitan perijinan dan non perijinan sesuai peraturan perundang – undangan.

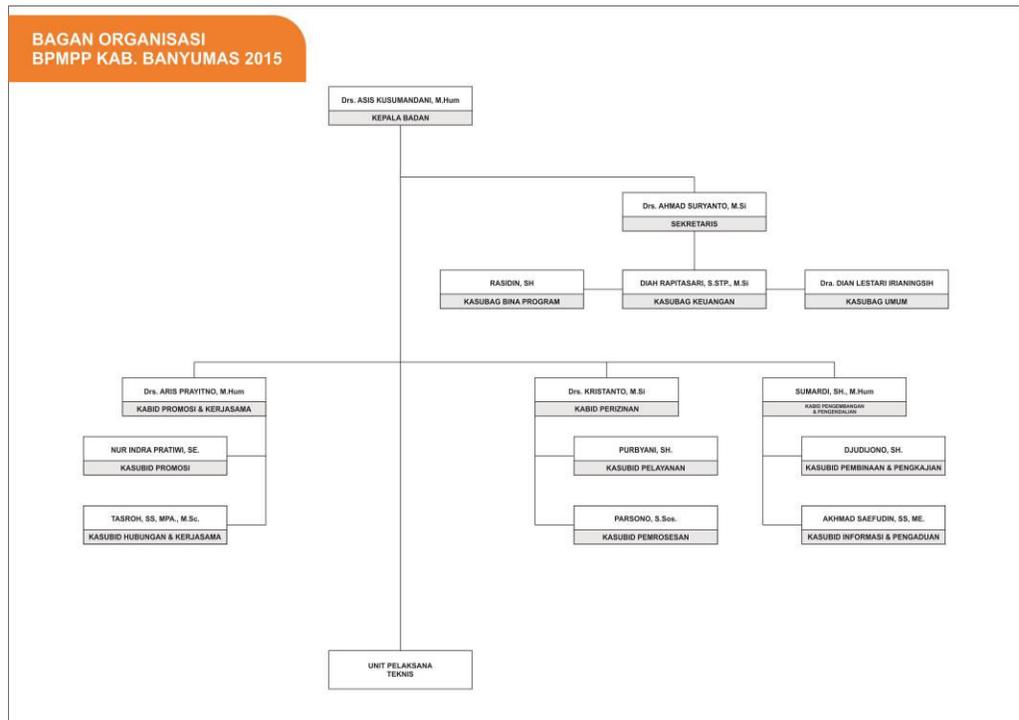
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut BPMPP mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. Pendokumentasian penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- Kepala Badan
- Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
- Bidang Perizinan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pelayanan
 - Sub Bidang Pemrosesan
- Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pembinaan dan Pengkajian
 - Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi BPMPK Kabupaten Banyumas terdiri dari:



PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Sekretaris Badan

Sekretaris badan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan, pelayanan administrasi keuangan, dalam rangka penyelarasan dengan tujuan organisasi, administrasi surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan guna terwujudnya sinkronisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan.

(3) Kepala Subbagian Bina Program

Subbagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan dalam rangka penyesuaian dengan tujuan organisasi

(4) Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memperlancar ketersediaan dan tertib administrasi keuangan Badan.

(5) Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan guna kelancaran tugas urusan umum.

KEPALA BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA

(1) Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama

Kepala bidang promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal guna terwujudnya iklim / peluang investasi yang baik.

(2) Kepala Subbidang Promosi

Kepala Subbidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan promosi penanaman modal guna tercapainya target penanaman modal yang telah ditetapkan dan berkembangnya perekonomian daerah

(3) Kepala Subbidang Hubungan dan Kerjasama

Kepala Subbidang Hubungan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama

penanaman modal guna tercapainya iklim penanaman modal yang kondusif.

BIDANG PERIJINAN

(1) Kepala Bidang Perijinan

Kepala Bidang Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kepala Subbidang Pelayanan

Kepala Subbidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi para penanaman modal.

(3) Kepala Subbidang Pemrosesan

Kepala Subbidang Pemrosesan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan ijin berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi penanaman modal.

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN

(1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengendalian penanaman modal guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan tertibnya

pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kepala Subbidang Pembinaan dan Pengkajian

Kepala Subbidang Pembinaan dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan, advokasi, supervise, dan konsultasi serta pelaksanaan penanaman modal guna terkendalinya kegiatan usaha/penanaman modal.

(3) Kepala Subbidang Informasi dan Pengaduan

Kepala Subbidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pemberian informasi data perkembangan penanaman modal, pemberian ijin, regulasi dan pengaduan penyimpangan penggunaan ijin penanaman modal guna terwujudnya citra daerah yang kondusif terhadap penanaman modal.

Jumlah pegawai yang ada di BPMPP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2015 ada Pegawai BPMPP Kab.Banyumas menurut Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan:

No.	Gol.	Jenis Kelamin			Pendidikan						
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	JML
1.	IV	8	0	8	0	0	0	0	0	8	8
2.	III	12	13	25	0	0	7	2	15	1	25
3.	II	4	4	8	0	0	8	0	0	0	8
4.	I	4	0	4	3	1	0	0	0	0	4
	JML	28	17	45	3	1	15	2	15	9	45
5.	PTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML TOTAL	28	17	45	3	1	15	2	15	9	45

Jumlah pegawai yang ada di BPMPP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2016 ada Pegawai BPMPP Kab.Banyumas menurut Eselon:

IV B	IV A	III B	III A	II B	II A
0	9	3	1	1	0

C. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKJIP

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2016. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas serta mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
	Tugas pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas,
	Latar belakang penyusunan LKjIP
	Dasar Hukum Penyusunan LKjIP BPMPP Kab. Banyumas
	Sistimatika Penyusunan LKjIP
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2015
Bab III	Akuntabilitas Kinerja
	Akuntabilitas Keuangan.
Bab IV	Penutup

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016

A. Perencanaan Kinerja

Rencana kinerja dapat didefinisikan sebagai analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa datang. Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003, Perencanaan Kinerja diartikan sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja beserta target – targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan kinerja tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 dan mengacu pula pada Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Kepala SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertera dalam RENSTRA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas periode tahun 2013 – 2018 dengan Visi “ *Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal untuk mendukung Kabupaten Banyumas yang berdaya saing* “

Untuk mewujudkan Visi tersebut di jabarkan dalam Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas adalah :

Misi BPMPP Kabupaten Banyumas adalah:

- Meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal
- Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders;
- Meningkatkan Pengendalian dan pengembangan Penanaman Modal.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 3 tujuan dan 3 sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan

1. Tujuan dan Sasaran

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kineja
1.	Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah transparan	Meningkatnya pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah transparan	- Jumlah izin yang terbit - Survei Kepuasan Masyarakat
2.	Peningkatan jumlah nilai investasi	Meningkatnya jumlah nilai investasi	- Jumlah investor berskala PMDN / PMA - Jumlah nilai investasi berskala PMDN / PMA - Ratio tenaga kerja

3.	Meningkatkan iklim penanaman modal	Meningkatnya iklim penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan kegiatan Penanaman modal - Jumlah aduan perizinan
----	------------------------------------	------------------------------------	---

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan yang diambil untuk tercapainya tujuan dan sasaran BPMPP yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 adalah :

- Membangun daya tarik investasi dan memberikan peluang-peluang investasi daerah pada bidang-bidang yang menjadi unggulan daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing.

3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	
1	Pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran fisik dan non fisik	Terpenuhinya kebutuhan ketatausahaan	12 bulan	100 %
2	Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat dan transparan	Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha	3500 SK izin	100 %
		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal	4 kali kegiatan sosialisasi 27 kecamatan	100 %
		Terwujudnya prosedur pelayanan perizinan yang lebih sederhana	1 dokumen kajian	100 %
		Peningkatan pemahaman legalitas aparatur pelayanan dan sinkronisasi BPMPD dengan aparatur pelayanan di kecamatan	27 Kec.	100 %
	Terbangunnya kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersedianya Data informasi peluang investasi	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan dunia usaha	2 (dua) kali temu usaha	100 %
		Terlaksananya	3 (tiga) kali	100 %

		pameran promosi investasi dan media sarana promosi	promosi investasi & 1 Paket Media Promosi	
		Tersedianya data potensi / peluang investasi	(1 (satu) dokumen potensi / peluang investasi daerah 300 buku	100 %
3	Terpantauanya pengembangan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	12 bulan dengan nilai realisasi investasi Rp.2.738.891 .750.025,-	100 %

B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis.

Rincian penetapan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah dapat dilihat pada table penetapan kinerja sebagai berikut :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2016 SEBELUM	ANGGARAN 2016 SETELAH
	STRATEGIS	KINERJA			PERUBAHAN	PERUBAHAN
				<i>Jumlah Total</i>	Rp 1.825.920.000	Rp 2.095.920.000
1		Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor BPMPP Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksi selama 12 bulan	12 bulan 100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 616.400.000	Rp 730.250.000
				1. Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 160.000.000	Rp 170.000.000
				2. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Rp 128.200.000	Rp 148.200.000
				3. Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan	Rp 43.200.000	Rp 44.550.000
				4. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	Rp 135.000.000	Rp 217.500.000
				5. Pengendalian dan Penatausahaan keuangan Daerah	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
2		Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor BPMPP Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksi selama 12 bulan	12 bulan 100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 262.520.000	Rp 383.670.000
				1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp 110.000.000
				2. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Rp 100.000.000	Rp 110.000.000
				3. Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Rp 132.520.000	Rp 143.670.000
				4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000

3				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
				1. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
4				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 295.000.000	Rp 295.000.000
		Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal	2 kali temu usaha 100 UMKM	1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Rp 95.000.000	Rp 95.000.000
		Terlaksananya pameran / promosi dan media / sarana promosi investasi	3 kali promosi investasi	2. Penyelenggaraan Promosi Investasi	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
5				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 110.000.000	Rp 110.000.000
		Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	12 bulan, 27 kecamatan	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
		Terselesainya sengketa perizinan penanaman modal	12 bulan 100%	2. Penyelesaian Sengketa Perizinan Penanaman Modal	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
6				Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
		Tersedianya data potensi / peluang investasi	500 buku	1. Penyusunan Buku Profil Potensi / Peluang Investasi Daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000

7				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 462.000.000	Rp 497.000.000
	Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang prima, mudah cepat dan transparan	Terwujudnya legalitas untuk usaha	3.500 SK Izin	1. Mekanisme Perijinan	Rp 190.000.000	Rp 215.000.000
		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan	4 kali sosialisasi 27 kecamatan	2. Sosialisasi Penanaman Modal	Rp 67.000.000	Rp 67.000.000
		Terwujudnya prosedur pelayanan perizinan yang sederhana	2 dokumen prosdur pelayanan	3. <i>Kajian Prosedur Pelayanan Perizinan</i>	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
		Peningkatan pemahaman aparatur pelayanan dan sinkronisasi antara BPMPP dengan aparatur pelayanan di kecamatan	27 Kecamatan	4. Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp 155.000.000	Rp 165.000.000
				JUMLAH	Rp 1.825.920.000	Rp 2.095.920.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
91 s/d 100	Sangat berhasil / sangat baik
71 s/d 90	Cukup berhasil / cukup baik
55 s/d 70	Kurang berhasil / kurang baik
Kurang dari 55	Tidak berhasil / tidak baik

Indikator kinerja sasaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal pelayanan perizinan yang meliputi aspek pelayanan umum administrasi perkantoran, aspek peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan, aspek peningkatan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan aspek peningkatan iklim investasi. Hasil pengukuran indicator kinerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016				CAPAIAN %
	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA	REALISASI	
I.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Input : Dana	Rupiah	Rp. 170.000.000,-	Rp. 152.911.423,-	89 %
	Output: Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, peralatan dan	Bulan	12	12	100

	perlengkapan dalam 1 (satu) tahun				
	Outcome: Terpenuhinya pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan	Bulan	12	12	100
2.Penyediaan Bahan Logistik	Input : Dana	Rupiah	Rp. 148.200.000,-	Rp. 131.931.032,-	89
	Output : Tersedianya kebutuhan operasional kantor	Bulan	12	12	100
	Outcome : Terpenuhinya bahan logistic kantor untuk mendukung kualitas pelayanan	Bulan	12	12	100
3.Penyediaan tenaga administrasi , keamanan, pengemudi dan kebersihan	Input : Dana	Rupiah	Rp. 44.550.000,-	Rp. 44.550.000	100
	Output : Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	Bulan	12	12	100
	Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
4.Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	Input: Dana	Rupiah	Rp. 217.500.000,-	Rp. 205.411.833,-	94
	Output : Terselenggaranya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	100
	Outcome: Terlaksananya rapat – rapat koordinasi untuk	Bulan	12	12	100

	mendukung tugas dan pelayanan				
5.Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah	Input: Dana	Rupiah	Rp. 150.000.000,-	Rp. 147.915.000,-	98
	Output : Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan	Bulan	12	12	100
	Outcome: Tersusunnya realisasi laporan keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan	Bulan	12	12	100
II.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA					
1.Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input: Dana	Rupiah	Rp. 110.000.000,-	Rp. 95.195.000,-	86
	Input : Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor	Bulan	12	12	100
	Outcome : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi optimal	Bulan	12	12	100
2.Pemeliharaan rutin gedung kantor	Input : Dana	Rupiah	Rp. 110.000.000,-	Rp. 90.925.184,-	83
	Output: Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	12	100
	Outcome : Kenyamanan Saranan dan Prasarna untuk mendukung peningkatan pelayanan	Bulan	12	12	100

3.Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Input : Dana	Rupiah	Rp. 143.670.000,-	Rp. 94.353.782,-	66
	Output: Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Bulan	12	12	100
	Outcome : Meningkatkan kinerja pegawai dan kelancaran peningkatan pelayanan	Bulan	12	12	100
4.Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input: Dana	Rupiah	Rp. 20.000.000,-	Rp. 16.953.300,-	85
	Ouput : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik yang siap digunakan	Bulan	12	12	100
	Outcome : Peningkatan sarana peralatan dan perlengkapan memadai mendukung kinerja pegawai	Bulan	12	12	100
III.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
1.Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD	Input : Dana	Rupiah	Rp. 30.000.000,-	Rp. 28368.050,-	94
	Output : Menyusun dokumen perencanaan, pelaporan dan	Bulan	12	12	100

	evaluasi kinerja				
	Outcome: Tersajinya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	Bulan	12	12	100
IV.PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI					
1,Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan duniMa usaha	Input : Dana	Bulan	Rp. 95.000.000,-	Rp. 91.130.600,-	96
	Output: Terselenggaranya temu usaha lintas stakeholders	Temu usaha	2 kali temu usaha	2 kali tem usaha	100
	Outcome : Meningkatnya kemitraan dan kerjasama penanaman modal diantara stakeholders	UMKM	100 UMM	125 UMKM	125
2.Penyelenggaraan promosi Investasi	Input : Dana	Rupiah	Rp. 200.000.000,-	Rp. 198.084.389,-	99
	Output: Terlaksananya kegiatan pameran investasi	Kali	3 x kali pameran	4 kali pameran	133
	Outcome: Peningkatan realisasi investasi di kabupaten Banyumas	Persen	100	133	1,33
V.PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI					
1.Monitoring evaluasi dan pelaporan	Input: Dana	Rupiah	Rp. 50.000.000,-	Rp. 40.191.6000,-	80
	Output:				

	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal di Kab. Banyumas	Bulan	12	12	100
	Outcome: Terpantaunya kegiatan usaha penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi	Perusahaan	80 Perusahaan	124 perusahaan	155
2.Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal	Input : Dana	Rupiah	Rp. 60.000.000,-	Rp. 48.461.000,-	81
	Output : Terlaksananya penyelesaian sengketa penanaman modal	Bulan	12	12	
	Outcome: Terfasilitasinya penyelesaian sengketa penanaman modal	Jumlah adua	24 aduan perizinan	46 Aduan Perizinan	191
VI.PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA					
1.Penyusunan buku profil potensi peluang investasi daerah	Input: Dana	Rupiah	Rp. 50.000.000,-	Rp. 44.695.125,-	89
	Output: Tersusunnya buku profil / peluang investasi daerah, sarana dan prasarana investasi	Bulan	12	12	100
	Outcome: Meningkatkan realisasi nilai investasi daerah.	Buku	500 buku	500 buku	100

VII.PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK					
1.Mekanisme perizinan	Input: Dana	Rupiah	Rp, 215.000.000,-	Rp.194.238.542,-	90
	Output: Pemrosesan pelayanan perizinan yang prima	Bulan	12	12	100
	Outcome: Terwujudnya Legalitas mekanisme pelayanan perizinan yang prima	Jumlah	3.500 SK	4.769 SK	136
2.Sosialisasi penanaman modal	Input: Dana	Rupiah	Rp. 67.000.000,-	Rp. 56.878.000,-	85
	Output: Tersampainya informasi penanaman modal	Bulan	12	12	100
	Outcome: Tersebarinya informasi penanaman modal	Kali	3 kali sosialisasi	4 kali sosialisasi	133
3.Kajian prosedur pelayanan	Input: Dana	Rupiah	Rp. 50.000.000,-	Rp. 42.008.810	84
	Output: Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana	Bulan	12	12	100
	Outcome: Tersajinya 1 dokumen kajian prosedur pelayanan yang sederhana	Dokumen	1 Dokumen kajian prosedur pelayanan	3 dokumen kajian prosedur pelayana	300 %
4.Peningkatan Pelayanan	Input : Dana	Rupiah	Rp.165.000.000,-	Rp. 157.554.200,-	95
	Output: Pemberian konsultasi (advising) perizinan kepada pelaku usaha dan	Bulan	12	12	100

	peningkatan kemampuan teknis aparatur pelaksana perizinan BPMPP dan Kecamatan				
	Outcome: Terwujudnya peningkatan pemahaman legalitas perizinan bagi masyarakat pelaku usaha dan aparatur pelaksana perizinan BPMPP dan Kecamatan	Kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100
Rata-rata jumlah APBD untuk program / kegiatan TA 2016			Rp.2.102.600.000,-	Rp.1.881.996.420,-	89,5

Adapun hasil pengukuran diatas maka dapat direkapitulasi capaian kerja yang hanya terbatas pada pemantauan atau pengukuran indicator kegiatan input, output saja tapi melihat outcome dan di hitung secara keseluruhan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagai berikut :

REKAPITULASI CAPAIAN AKHIR REALISASI KEGIATAN TAHUN 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL REALISASI INDIKATOR (%)		KETERANGAN
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				97
1.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Input	89	
		Output	100	
		Outcome	100	
			96	Sangat baik
2	Penyediaan bahan logistic	Input	89	
		Output	100	
		Outcome	100	
			96	Sangat baik
3	Penyediaan tenaga administrasi keamanan, pengemudi dan	Input	100	
		Output	100	

	kebersihan	Outcome	100	
4	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	Input	94	
		Output	100	
		Outcome	100	
			94	Sangat baik
5.	Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah	Input	98	
		Output	100	
		Outcome	100	
			99	Sangat baik
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				93
1.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	86	
		Output	100	
		Outcome	100	
			95	Sangat baik
2.	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Input	83	
		Output	100	
		Outcome	100	
			94	Sangat baik
3	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Input	66	
		Output	100	
		Outcome	100	
			87	Cukup baik
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	85	
		Output	100	
		Outcome	100	
			95	Sangat baik
III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				98
1	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD	Input	94	
		Output	100	
		Outcome	100	
			98	Sangat baik

V. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI				114
1.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Input	96	
		Output	100	
		Outcome	125	
			107	Sangat baik
2.	Penyelenggaraan promosi investasi	Input	99	
		Output	133	
		Outcome	133	
			122	Sangat baik
VI. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI				118
1.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input	80	
		Output	100	
		Outcome	155	
			112	Sangat baik
2.	Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal	Input	81	
		Output	100	
		Outcome	191	
			124	Sangat baik
VII. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA				96
1.	Penyusunan buku profil potensi peluang investasi daerah	Input	89	
		Output	100	
		Outcome	100	
			96	Sangat baik
VIII. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK				115
1.	Mekanisme perizinan	Input	90	
		Output	100	
		Outcome	100	
			96	Sangat baik
2.	Sosialisasi penanaman modal	Input	85	
		Output	100	
		Outcome	133	
			106	Sangat baik

3.	Kajian prosedur pelayanan	Input	84	
		Output	100	
		Outcome	300	
			161	Sangat baik
4	Peningkatan pelayanan	Input	95	
		Output	100	
		Outcome	100	
			98	Sangat baik

Penghitungan capaian kinerja pada BPMPP Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dari 8 Program dengan 19 kegiatan dapat dikategorikan sangat baik.

CAPAIN TARGET KINERJA BERDASARKAN PEMBANDINGAN DENGAN RKPD 2016

Capaian kinerja berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan bidang penanaman modal pelayanan perijinan yang meliputi aspek pelayanan umum administrasi perkantoran, aspek peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan, aspek peningkatan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan aspek peningkatan iklim investasi. Hasil pengukuran indicator kinerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / KONDISI	TAHUN 2016	
		TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan (100%)	12 bulan (97 %)
2.	Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha	3500 SK	4.769 SK
3.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan	3 kali sosialisasi	4 kali sosialisasi
4.	Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana	1 Dokumen kajian prosedur pelayanan	3 Dokumen kajian prosedur pelayanan
5.	Terwujudnya peningkatan pemahaman legalitas perijinan bagi masyarakat	27	27 Kecamatan

	pelaku usaha dan aparaturnya pelaksana perizinan BPMPP Kabupaten Banyumas	Kecamatan	
6.	Terbangunnya komunikasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha	2 kali temu usaha	2 kali temu usaha
7.	Terlaksananya pameran dan sarana promosi investasi	3 kali pameran	4 kali pameran
8.	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	80 perusahaan	124 perusahaan
9.	Tersusunnya buku profil / peluang investasi daerah dan tersedianya data peluang, sarana prasarana	500 buku potensi investasi	500 buku potensi investasi

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PEMBANDINGAN TARGET KINERJA 2016

Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan direpresentasikan berdasarkan capaian Perjanjian Kinerja, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran fisik dan non fisik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan	100 %	97 %
Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang prima	- Terwujudnya legalitas untuk usaha	3.500 SK	4.769 SK
	- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan	3 kali sosialisasi	4 kali sosialisasi
	- Terwujudnya prosedur pelayanan perizinan yang sederhana	1 Dokumen kajian	3 Dokumen Kajian
	- Peningkatan pemahaman	27	27

	aparatur pelayanan dan sinkronisasi antara BPMPP dengan aparatur pelayanan di kecamatan	kecamatan	kecamatan
Terbangunnya kerjasama penanaman modal dan peningkatan investasi serta tersedianya data informasi peluang investasi	- Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal.	2 kali temu usaha	2 kali temu usaha
	- Terlaksananya pameran / promosi dan media / sarana promosi investasi	3 kali pameran	4 kali pameran
	- Tersedianya data potensi / peluang investasi	1 Dokumen	1 Dokumen
Terpantaunya pengembangan dan pengendalian penanaman modal	- Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	12 bulan, 27 kecamatan	12 bulan, 27 kecamatan

Hasil capaian sasaran dan capaian indicator kegiatan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan visi misi BPMPP dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU dapat) dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Kategori
1	Meningkatkan pelayanan perizinan cepat, tepat, mudah dan transparan	Meningkatnya pelayanan perizinan cepat, tepat, mudah dan transparan	1. Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal 3. Terwujudnya prosedur pelayanan	167 %	Sangat baik

			yang lebih sederhana		
			4. Terwujudnya sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan dikecamatan dengan BPMPP		
2	Peningkatan jumlah nilai investasi	Meningkatnya jumlah nilai investasi	1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	119 %	Sangat baik
			2. Terlaksananya pameran dan media / sarana promosi investasi		
			3. Tersedianya data potensi / peluang investasi daerah		
3	Meningkatkan iklim penanaman modal	Meningkatnya iklim penanaman modal	1. Terwujudnya legalitas untuk	117 %	Sangat baik

			kegiatan usaha 2. Terlaksananya sosialisasi perizinan dan penanaman modal 3. Tersedianya tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pint (PTSP) dan pedoman rencana umum penanaman modal (RUPM) 4. Terasilitasi sengketa perizinan penanaman modal 5. Sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Kecamatan dan BPMPP		
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				134 %	SANGAT BAIK

PENGUKURAN KINERJA PADA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN PEMBANDINGAN TAHUN 2015

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian %	Kenaikan / Penurunan
			2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (100%)	12 bulan (100%)	12 bulan (97 %)	12 bulan (99,5%)	99%	-1
2.	Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha	3500 SK IZIN	4,769 SK	4.713 SK (135 %)	134	-7,6
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal	4 kali kegiatan sosialisasi 27 Kecamatan	4 kali sosialisasi	5 kali kegiatan (102 %)	125	25
4	Tewujudnya prosedur pelayanan perizinan yang lebih sederhana	1 dokumen kajian	3 Dokumen Kajian	2 Dokumen	200	200
5	Peningkatan pemahaman legalitas aparatur pelayanan dan sinkronisasi BPMPP dengan apartur pelayanan di kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100	100
.6	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan dunia usaha	2 (dua) kali temu usaha 100 UMKM	2 kali temu usaha	2 kali temu usaha	100	100
8.	Terlaksananya pameran promosi investasi dan media sarana promosi	3 (tiga) kali promosi Investasi & 1 Paket Media Promosi	4 (kali) kali promosi	3 (tiga) kali promosi Investasi & 1 Paket Media Promosi	100	-33

9.	Tersedianya data potensi/pejuang investasi	1 (satu) dokumen potensi/pejuang investasi daerah 300 buku	1 (satu) dokumen potensi / pejuang investasi daerah 500 (lima ratus) buku	1 (satu) dokumen potensi/pejuang investasi daerah 300 buku	100	100
10.	Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	12 bulan dengan nilai realisasi investasi RP. 235.000.000.000	12 bulan dengan nilai realisasi investasi Rp. 2.738.891.750 .025,-	12 bulan dengan nilai realisasi investasi RP. 605.935.145.592	257	157

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RENSTRA, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis BMPP Kabupaten Banyumas pada tahun 2015, maka dari 3 misi tersebut adalah yaitu :

- Meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal
- Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders;
- Meningkatkan pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

Visi dan Misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 3 tujuan dan 3 sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumasa adalah Peningkatan Investasi daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Banyumas.dengan 3 (tiga) sasaran yaitu

1. Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan
2. Terbangunnya Kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersediannya Data informasi peluang investasi
3. Terpantaunya Pengembangan dan pengendalian penanaman modal

Dari 3 (tiga) sasaran diwujudkan dengan program, capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoraan 94 % dengan 5 (lima) kegiatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana 80 % dengan 4 (empat) kegiatan
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 94 % dengan 1 (satu) kegiatan
4. Program peningkatan kualitas pelayanan public 102 % dengan dengan 4 (empat) kegiatan
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama 97 % dengan 2 kegiatan
6. Program peningkatan iklim envestasi dan realisasi investasi 81 % dengan 2 (dua) kegiatan
7. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 88 % dengan 4 (empat) kegiatan kegiatan

Gambaran capaian sasaran tersebut diukur dengan indicator kinerja pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja yaitu dengan analisis hasil capaian yang ada pada table diatas) maka sampai tahun 2016 capaian kinerja sasaran dari 3 (tiga) sasaran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan dengan rata – rata capaian 167 % (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 4 (empat) indikator dan indikator yang melebihi target adalah indikator Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal dengan total capaian 133 % .
2. Meningkatnya jumlah nilai investasi dengan rata – rata capaian 119 % (sangat baik) capaian tersebut di ukur dari 3 (tiga) indikator dan indikator yang melebihi target adalah indikator peningkatan promosi investasi dengan total capaian 133 % yang dipengaruhi dengan pameran yang dilaksanakan melebihi target dari 3 kali pameran menjadi 4 kali kegiatan
3. Meningkatnya iklim penanaman modal dengan rata rata capaian 117 % (sangat baik) capaian tersebut di ukur dari 5 (lima) indikator yang melebihi target yang dipengaruhi dengan nilai investasi dari target Rp. 240.000.000.000,- menjadi Rp. 2.738.891.750.025,-

Sedangkan untuk mewujudkan RPJM 2013 – 2018 yaitu dengan meningkatnya nilai investasi yang di dukung dengan pelaksanaan program Peningkatan iklim nilai investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

DATA CAPAIAN TARGET RPJMD 2013-2018

NO	Urusan Wajib	Kinerja Indikator	Target RPJM s/d 2018	Capain kinerja RKPD 2014		Capain kinerja RKPD 2016	
				Target 2014	Capaian 2014	Target 2016	Capaian 2016
	PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Investor berskala nasional	600	560	927	580	1.041
		2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	250.000.000.000	235.000.000.000	360.321.440.000	240.000.000.000	2.738.891.750.025,-
		3. Rasio daya serap tenaga kerja	13 %	10	11	11	12
		4. Lama proses perijinan	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana Belanja BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar Rp. 2.102.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.881.996.420,- atau 89,5%.

Rincian Anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Anggaran RP	Realisasi RP	%
I	Target Pendapatan dan Realisasi	4.395.000.000,-	4.603.563.417,-	106
	Pendapatan dari Retribusi Penerbitan SK Izin	4.395.000.000,-	4.603.563.417,-	106
II	Belanja	2.102.600.000,-	1.881.996.420,-	89,5
	Belanja Pegawai	156.700.000,-	156.315.000,-	99,75
	Barang dan jasa	1.835.900.000,-	1.630.486.420,-	89
	Belanja Modal	110.000.000,-	95.195.000	87

Sedangkan biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran terinci dalam anggaran dan realisasi per program/kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
		1. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 170.000.000,-	Rp.152.911.423,-	89
		2. Penyediaan bahan logistic kantor	Rp.148.200.000,-	Rp.131.931.032,-	89
		3. Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, 4. pengemudi dan kebersihan	Rp. 44.550.000,-	Rp. 44.550.000,-	100
		5. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	Rp.217.500.000,-	Rp. 205.411.833,-	94
		6. Pengendalian dan peñata usahaan keuangan daerah	Rp. 150.000.00,-	Rp.147.915.000,-	98
2	Program				

	peningkatan sarana dan prasarana				
		5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 110.000.000,-	Rp. 95.195.000,-	86
		6. Pemeliharaan rutin gedung kantor	Rp. 110.000.000,-	Rp. 90.925.184,-	83
		7. Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Rp. 143.670.000,-	Rp. 94.353.782,-	66
		8. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 20.000.000,-	Rp. 16.953.300,-	85
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
		2. Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD	Rp. 30.000.000,-	Rp. 28.365.050,-	94 %
4.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi				
		3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Rp. 95.000.000,-	Rp.91.130.600,-	96 %
		4. Penyelenggaraan promosi investasi	Rp. 200.000.000,-	Rp.198.084.389,-	99 %
5	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi				
		3. Monitoring,	Rp. 50.000.000,-	Rp. 40.191.600,-	80 %

		evaluasi dan pelaporan			
		4. Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal	Rp. 60.000.000,-	Rp. 48.461.000,-	81%
6.	Program potensi penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana daerah				
		2. Penyusunan buku profil potensi / peluang investasi daerah	Rp. 50.000.000,-	Rp. 44.695.125,-	89 %
7	Program peningkatan kualitas pelayanan public				
		1. Mekanisme perizinan	Rp. 215.000.000,-	Rp. 194.238.542,-	90
		2. Sosialisasi penanaman modal	Rp. 67.000.000,-	Rp. 56.878.000,-	85
		3. Kajian prosedur pelayanan perizinan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 42.008.810,-	84
		4. Peningkatan pelayanan perizinan	Rp. 165.000.000,-	Rp. 157.554.200,-	95 %
TOTAL ANGGARAN			2.095.920.000,-	Rp.1.881.996.420,-	89,5 %

Keterangan :

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.881.996.420,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari target sebesar Rp. 2.095.920.000,- (Dua milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh persen), rata-rata realisasi fisik 100 % (seratus persen), dengan keterangan sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran sebesar Rp. 730.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 682.719.288,- atau 81, 30 %, dengan realisasi fisik 100%, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan kegiatan penyediaan bahan logistic

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana , anggaran sebesar Rp. 383.670.000,-realisasi keuangan sebesar Rp. 297.427.266,- atau 76 %, sedangkan realisasi fisik 100%. hal tersebut terjadi dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 28.368.050,- atau 94 %, adapun realisasi fisik 100%.
4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi anggaran sebesar Rp.299.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 289.214.989,- atau 97 %, sedangkan realisasi fisik 133 %.
5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 88.652.600,- atau 81 %, sedangkan realisasi fisik 100 %.
6. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-realisasi keuangan sebesar Rp. 44.695.125,- atau 89 %, adapun realisasi fisik 100%.
7. Program peningkatan pelayanan publik, anggaran sebesar Rp. 497.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 450.679.552,- atau 91 %, adapun realisasi fisik 100%. hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran kegiatan sosialisasi penanaman modal dan kajian prosedur pelayanan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2016 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Kesimpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2016 dapat disimpulkan semua program dan kegiatan **BERHASIL**
- Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal , *Capaian* ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja dari *Kegiatan Kajian Prosedur Pelayanan dan kegiatan* Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diampu oleh bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, dua kegiatan ini melampaui target yang sangat signifikan, Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan lainnya mencapai target namun tidak signifikan, namun secara garis besar semua program dan kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

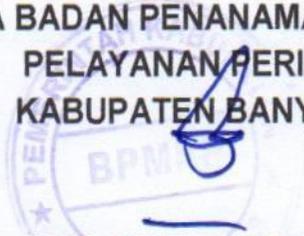
1. Masih adanya sebagian masyarakat pelaku usaha yang belum sadar untuk mengurus izin.
2. Masih adanya Peraturan Daerah yang belum mendukung terlaksananya pelayanan yang menunjang kegiatan usaha dan peluang iklim investasi berdasarkan kawasan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Pemecahan masalah:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin berusaha.
2. Peninjauan kembali terhadap regulasi baik merevisi maupun membuat regulasi baru untuk terciptanya Kabupaten Banyumas yang pro investasi.
3. Membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Penanaman Modal (RIPP)/blue print investasi sebagai pedoman dan arahan pengusaha dan pengembangan potensi dan kemampuan daerah pada bidang investasi/penanaman modal.

Kesimpulan :

Dari total anggaran Rp. 2.095.920.000,- untuk 7 (tujuh) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan pada BPMPP Kabupaten Banyumas berhasil terserap sebesar Rp. 1.881.996.420,- (89,7 %), dengan target fisik rata-rata sebesar 100% maka secara garis besar semua kegiatan tercapai walau kenaikan secara prosentase kenaikannya tidak signifikan, namun dari segi anggaran mengalami efisiensi yang sangat baik sehingga dari 7 (tujuh) Program dengan 19 (Sembilan belas) kegiatan semua berjalan lancar mencapai 100%.

Purwokerto, 30 Desember 2016
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1 021

LAMPIRAN



PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir.H.ACHMAD HUSEIN
Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Januari 2016

Pihak Kedua,

BUPATI BANYUMAS


Ir. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1 021

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran : 2016

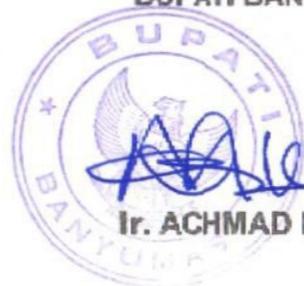
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada BPMPP Kab Banyumas	Pemenuhan kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran (Ketatausahaan)	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	616.400.000
	Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, peralatan dan perlengkapan	100%	1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000
	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	100%	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.200.000
	Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan	100%	3. Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan	43.200.000
	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	135.000.000
	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan pada BPMPP Kabupaten Banyumas	100%	5. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	150.000.000
Tersedianya sarana prasarana untuk menunjang operasional kantor	Pemenuhan dan terpeliharanya sarana prasarana kantor untuk menunjang operasional kantor	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.520.000
	Terpeliharanya rutin gedung kantor dan rumah dinas	100%	1. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	100.000.000
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik yang siap digunakan	100%	2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	132.520.000
	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik yang siap digunakan	100%	3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000

Penyusunan dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja BPMPP	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000
	Tersusunnya dokumen perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja pada BPMPP Kabupaten Banyumas	Dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, LKjIP, Perjanjian Kinerja, IKM, Evaluasi Kinerja SKPD,	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	30.000.000
Terbangunnya kerjasama penanaman modal dan meningkatnya investasi serta tersedianya informasi peluang investasi	Terbangunnya komunikasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha serta terlaksananya pameran/promosi dan media/sarana promosi investasi.	2 Kali Temu usaha 3 kali penyelenggaraan promosi investasi 1 paket media promosi investasi	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	295.000.000
	Terbangunnya komunikasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha	2 kali temu usaha	1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.	95.000.000
	Terlaksananya pameran/promosi dan media/sarana promosi investasi.	- 3 kali penyelenggaraan promosi investasi - 1 paket media promosi investasi	2. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi	200.000.000
Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Terpantaunya pengendalian dan pengembangan penanaman modal yang kondusif	12 bulan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	110.000.000
	Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	12 bulan	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000
	Terselesainya sengketa perizinan penanaman modal	12 bulan	2. Penyelesaian Sengketa Perizinan Penanaman Modal	60.000.000
Penyebaran data sebagai promosi investasi melalui dokumen investasi kepada Dunia Usaha	Penyebarluasan data peluang investasi daerah sebanyak 500 Exp	Adanya data peluang investasi daerah sebanyak 500 Exp	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	50.000.000
	Tersedianya data potensi/peluang investasi	1(satu) dokumen potensi peluang investasi daerah.	1. Penyusunan buku profil potensi / peluang investasi daerah	50.000.000

Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah dan transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	452.000.000
	Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha	3.500 SK	1. Mekanisme Perizinan	190.000.000
	Meningkatnya Pengelahuan Masyarakat tentang Penanaman Modal	4 kali penyelenggaraan sosialisasi penanaman modal	2. Sosialisasi Penanaman Modal	67.000.000
	Terwujudnya Prosedur Pelayanan yang lebih sederhana	1 (satu) Jenis kajian persyaratan perizinan	3. Kajian Prosedur Pelayanan	50.000.000
	Terwujudnya sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakandi Kecamatan dengan BPMPP dengan pemberian konsultasi (Advising)	27 Kecamatan	4. Peningkatan Pelayanan Perizinan	155.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG				Rp. 1.825.920.000

Purwokerto, Januari 2016

BUPATI BANYUMAS



(Handwritten signature)
Ir. ACHMAD HUSEIN

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS**



(Handwritten signature)
Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1 021